

**BAB II**  
**PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA**  
**2002-2007**

**LATAR BELAKANG**

Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Propinsi DKI Jakarta harus diakui telah banyak mengalami kemajuan dan perubahan yang pesat. Pembangunan telah mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan pendapatan, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat. Disamping itu peningkatan hubungan global yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi, sistem perekonomian terbuka, serta derasnya arus globalisasi telah pula mempengaruhi perubahan pola kehidupan, dari masyarakat yang tradisional dan sederhana kepada masyarakat perkotaan yang lebih modern, aktif, dan memiliki interaksi tinggi.

Namun demikian, pembangunan masih menyisakan perbedaan yang cukup tajam antara mereka yang berhasil dan mereka yang belum berhasil, dimana kelompok terakhir ini masih merupakan beban bagi Propinsi DKI Jakarta. Jurang perbedaan ini apabila tidak mendapatkan perhatian serius akan berpotensi menciptakan konflik sosial dan ketidakpuasan yang dapat menyudutkan posisi pemerintah daerah.

Situasi dan kondisi di atas mulai diperburuk oleh terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 yang menimbulkan gejolak di masyarakat serta tuntutan terhadap perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Propinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan konsentrasi aktivitas ekonomi nasional mengalami dampak paling besar atas terjadinya krisis ekonomi dan perubahan politik nasional. Permasalahan yang muncul terbilang kompleks, multidimensional dan berkaitan, sehingga membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh dari segenap komponen dan elemen yang ada di masyarakat.

Dinamika politik nasional dalam lima tahun terakhir telah menjadi proses pembelajaran berarti bagi kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi. Diharapkan ke depan, masyarakat akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi reformasi dan tidak terjebak pada kebebasan yang tidak terkendali yang dapat mematahkan dan mengabaikan supremasi hukum yang telah menjadi komitmen bersama. Dengan kata lain, terbentuknya masyarakat madani dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi bagian utama bagi berlangsungnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik.

## **KONDISI DAN POTENSI**

Analisis mengenai kondisi dan potensi Propinsi DKI Jakarta, di samping menggunakan analisis deskriptif juga memanfaatkan beberapa instrumen seperti *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share (SS)* dan *Revealed Comparative Advantage (RCA)*. Data dan informasi yang digunakan dalam analisis kondisi dan potensi ini bersumber dari hasil perhitungan BPS dan LPEM-UI. Berikut adalah hasil analisis:

### **Geografi**

Propinsi DKI Jakarta terletak di sebelah Selatan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bogor dan Depok, serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Lokasi Propinsi DKI Jakarta sangat strategis dan merupakan pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan internasional. Pelabuhan utamanya, Tanjung Priok, merupakan pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Dengan demikian tidak mengherankan jika Propinsi DKI Jakarta berfungsi pula sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan cakupan layanan nasional dan internasional. Demikian pula daya beli yang besar menyebabkan daerah ini menjadi daerah tujuan utama dari barang dan jasa. Letak geografisnya ini pula yang menyebabkan sejak jaman dahulu Propinsi DKI Jakarta selalu menjadi tujuan utama dari pergerakan barang dan manusia di Indonesia.

Wilayah Propinsi DKI Jakarta mencakup areal seluas sekitar 661.5 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Propinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kotamadya yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, dan satu kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Berdasarkan penggunaan tanahnya, terlihat bahwa sebagian besar tanah di Propinsi DKI Jakarta masih digunakan untuk perumahan (lihat Tabel 2.1.). Terlihat bahwa penggunaan lahan untuk perumahan pada periode 1995-1999 meningkat, kecuali di Jakarta Selatan. Namun secara total, sejak tahun 1996 lahan untuk perumahan ini semakin berkurang. Hal serupa terlihat pada lahan industri, yang penurunannya cukup signifikan di lima wilayah kota di Jakarta. Sementara penggunaan lahan untuk perkantoran terlihat pola yang berbeda di masing-masing wilayah kota, dimana di Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara terlihat kecenderungan meningkat, sementara di dua wilayah kota lainnya turun. Disamping itu mahalannya harga tanah di pusat perkotaan, menyebabkan perumahan bergeser ke daerah Barat, Timur dan Selatan Jakarta, bahkan lebih jauh lagi ke Kabupaten Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor. Sementara itu di wilayah selatan, yang sebelumnya sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan resapan air, dengan bertambahnya kebutuhan berbagai fasilitas ekonomi dan pemukiman, menyebabkan pola penggunaan lahannya berubah. Meningkatnya kawasan perumahan diikuti oleh perkembangan perkantoran, serta penambahan berbagai ruas jalan dan fasilitas umum. Keadaan ini yang menyebabkan penggunaan lahan untuk kegiatan lainnya meningkat.

**Tabel 2.1.**  
**Luas Tanah dan Penggunaannya Menurut Wilayah**  
**1995 - 2000**

No.	Wilayah	Luas Tanah (Ha)	Tahun	Penggunaan (%)				
				Perumahan	Industri	Perkantoran*	Taman	Lainnya
1	Jakarta Selatan	14573	1995	71.47	2.30	13.46	Na	12.77
			1999	68.32	1.32	11.99	0.91	17.46

2	Jakarta Timur	18773	1995	65.33	8.09	6.71	Na	19.87
			1999	70.93	5.41	8.14	1.83	13.68
3	Jakarta Pusat	4790	1995	62.20	10.91	19.64	Na	7.25
			1999	65.30	3.70	16.12	2.90	11.98
4	Jakarta Barat	12615	1995	64.30	5.22	16.30	Na	14.18
			1999	69.20	3.57	11.50	2.44	13.29
5	Jakarta Utara	15401	1995	42.86	16.29	7.95	na	32.90
			1999	52.59	13.86	9.46	2.62	21.47
6	Jakarta	66152	1995	60.97	8.36	11.28	na	19.39
			1996	67.37	4.93	10.77	1.96	14.97
			1997	67.20	5.13	11.27	2.17	14.23
			1998	65.74	6.44	10.43	1.97	15.43
			1999	65.35	6.00	10.51	2.01	16.13

Catatan : \* pada tahun 1995 menggabungkan data perkantoran, jasa dan perdagangannya = tidak ada data

Khusus mengenai industri, penurunan penggunaan lahan ini tampak erat kaitannya dengan keinginan Pemerintah Daerah yang ingin membatasi kegiatan industri manufakturnya ke arah industri yang berteknologi tinggi, tidak/rendah polusi dan tidak menggunakan lahan yang luas dan banyak air.

Dengan berkurangnya lahan perumahan dan industri, maka penggunaan lahan untuk perkantoran cenderung meningkat. Hal ini terutama didominasi oleh kegiatan jasa dan perdagangan yang memang cukup dominan di kawasan Propinsi DKI Jakarta. Terlepas bahwa Jakarta merupakan ibukota negara dan pusat kegiatan nasional, terlihat bahwa perekonomiannya sudah jauh melampaui perekonomian daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sementara itu dilihat dari indikator pekerja per luas daerah, tampak bahwa kemampuan Jakarta untuk menyerap tenaga kerja melebihi daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga tidak mengherankan bahwa walaupun Jakarta telah sangat padat penduduk, masih banyak orang yang tertarik untuk mengadu nasib di Jakarta. Namun jika dilihat proporsi angkatan kerja per luas daerah, maka jumlah orang yang tidak dapat terserap dalam lapangan usaha di Jakarta juga melebihi daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan membawa permasalahan sendiri pada perekonomian Propinsi DKI Jakarta, seperti masalah peningkatan pekerja di sektor informal dan perumahan kumuh, yang jika tidak ditangani secara baik akan berpengaruh pada masalah sosial lainnya, seperti masalah kriminalitas dan kemiskinan.

## Penduduk

Jumlah penduduk Propinsi DKI Jakarta pada Sensus Penduduk Tahun 2000 sebanyak 8.385.639 orang. Jumlah ini termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (tuna wisma dan awak kapal) yang berjumlah 28.364 orang. Dibanding dengan hasil Sensus Penduduk 1990 (8.259.266 orang), maka pertumbuhan penduduk Propinsi DKI Jakarta dalam sepuluh tahun (1990 - 2000) sangat kecil. Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 1990-2000 tersebut hanya sebesar 0,16 persen per tahun. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk ditengarai sebagai akibat: (1) keberhasilan program keluarga berencana, (2) menurunnya jumlah penduduk yang tinggal secara permanen di Jakarta karena dukungan sarana angkutan, mereka meninggalkan Jakarta dan menuju pemukiman di sekitar Jakarta.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**  
**menurut Kotamadya, 1980 - 2000.**

Kotamadya	Penduduk				
	1980	1990	2000	1980-1990	1990-2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Jakarta Selatan	1.582.194	1.913.084	1.789.006	1,92	-0,69
Jakarta Timur	1.460.068	2.067.213	2.353.023	3,54	1,35
Jakarta Pusat	1.245.030	1.086.568	893.198	-1,35	-2,01
Jakarta Barat	1.234.885	1.822.762	1.906.385	3,97	0,46
Jakarta Utara	981.272	1.369.630	1.444.027	3,39	0,55
<b>Propinsi DKI Jakarta</b>	<b>6.503.449</b>	<b>8.259.266</b>	<b>8.385.639</b>	<b>2,42</b>	<b>0,16</b>

Rendahnya laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan rendahnya tingkat fertilitas dan lebih banyaknya penduduk Propinsi DKI Jakarta yang keluar dibanding penduduk yang masuk. Bahkan di dua wilayah kotamadya (Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat) menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk.

**Tabel 2.3.**  
**Arus Migrasi di Propinsi DKI Jakarta 1975-2000**  
**(Ribuan Orang)**

<b>Periode</b>	<b>Migrasi Masuk</b>	<b>Migrasi Keluar</b>	<b>Migrasi Neto</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1975-1980	760,1	382,3	377,8
1985-1990	819,6	993,4	-173,8
1990-1995	592,6	823,0	-230,4
1995-2000	702,2	850,4	-148,2

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak periode (1985-1990) telah terjadi perubahan arus migrasi di Propinsi DKI Jakarta, yang tadinya arus migrasi masuknya lebih besar dibanding arus migrasi keluarnya, berubah menjadi arus migrasi keluarnya lebih besar dibanding migrasi masuknya. Kejadian ini berlangsung terus sampai periode 1995-2000.

Alasan utama perpindahan penduduk dari Propinsi DKI Jakarta ke Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) adalah masalah perumahan dan kenyamanan lingkungan. Hal ini didukung oleh berkembangnya sarana dan prasarana perumahan di Bodetabek, dan tersedianya sarana dan prasarana

angkutan umum yang cukup banyak dan beragam serta jaringan jalan (jalan tol) yang sangat memadai.

Pertumbuhan penduduk Propinsi DKI Jakarta 1990-2000 relatif rendah (0,16 persen per tahun), dimana salah satu faktor penyebabnya adalah migrasi neto negatif, hampir tidak tampak dalam keseharian karena banyaknya penduduk Bodetabek yang beraktivitas di Propinsi DKI Jakarta. Penduduk Bodetabek yang beraktivitas di Propinsi DKI Jakarta ini disebut masyarakat penglaju atau komuter atau ulang-alik.

Hasil Survei Migrasi Jabotabek 2001 yang dilaksanakan BPS Propinsi DKI Jakarta pada pertengahan tahun 2001 menunjukkan bahwa penduduk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang beraktivitas (bekerja, sekolah, dan kursus) di Propinsi DKI Jakarta berjumlah 1.017.339 orang. Sebanyak 1.012.435 orang berumur 10 tahun ke atas dan selebihnya berusia antara 5 - 9 tahun.

**Tabel 2.4**  
**Penglaju Bodetabek Berumur 10 Tahun ke Atas,**  
**Menurut Kegiatan yang Dilakukan di Propinsi DKI Jakarta, 2001**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Bekerja</b>	<b>Bekerja dan Sekolah/Kursus</b>	<b>Sekolah/Kursus</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kota Bogor	13.410	143	1.178	14.731	1,50

Kab. Bogor	96.578	657	3.088	100.323	9,90
Kota Depok	110.949	2.649	14.241	127.839	12,80
Kota Tangerang	87.640	2.052	23.015	112.707	11,10
Kab. Tangerang	297.140	5.359	67.786	370.285	36,60
Kota Bekasi	161.759	3.963	56.611	222.533	22,00
Kab. Bekasi	61.210	368	2.439	64.017	6,30
<b>Jumlah</b>	<b>826.686</b>	<b>15.191</b>	<b>168.558</b>	<b>1.012.435</b>	<b>100,00</b>
<b>(%)</b>	<b>(81,)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(16,6)</b>		

## Pendidikan

Dalam kurun waktu tahun 1997-2001, tingkat pendidikan penduduk Propinsi DKI Jakarta cenderung semakin tinggi. Ini ditandai oleh penurunan persentase penduduk yang berpendidikan rendah dan peningkatan persentase penduduk yang berpendidikan tinggi. Secara umum, penduduk yang berpendidikan rendah atau maksimal sekolah dasar turun, dari 38,16 persen tahun 1997 menjadi 37,92 persen pada tahun 2001 dan yang berpendidikan Universitas/DIV keatas mengalami kenaikan dari 3,24 persen tahun 1997 menjadi 5,03 persen tahun 2001. Sementara itu dirinci menurut jenis kelamin, tampak bahwa secara umum tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun demikian dari tahun ke tahun kesenjangananya semakin mengecil.

**Tabel 2.5**  
**Tingkat Pendidikan Usia 10 Tahun ke Atas**  
**Menurut Jenis Kelamin di Propinsi DKI Jakarta, 2001**

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan
---------------	--------------------

	<b>Paling Tinggi SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>DI-DIII/ Akademi</b>	<b>PT/DIV</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	32,63	19,74	36,95	4,25	6,44
Perempuan	43,12	20,76	27,76	4,7	3,66
<b>Total</b>	<b>37,92</b>	<b>20,25</b>	<b>32,31</b>	<b>4.48</b>	<b>5,03</b>

### **Kesehatan dan Gizi**

Secara umum perkembangan derajat kesehatan masyarakat ibukota selama kurun waktu 1997-2001 menunjukkan kecenderungan yang membaik. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator kesehatan seperti Angka Kematian Bayi yang mengalami penurunan dari 28 bayi per 1.000 kelahiran menjadi 21 Bayi per 1.000 kelahiran hidup. Implikasinya rata-rata usia harapan hidup penduduk Propinsi DKI Jakarta juga mengalami peningkatan dari 70,23 tahun menjadi 72,37 tahun. Untuk jelasnya perkembangan indikator yang disebutkan barusan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Midup (AHH)**  
**Penduduk Propinsi DKI Jakarta, 1997-2001**

<b>Indikator</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
AKB					
Laki-laki	32	30	28	25	24
Perempuan	24	22	20	19	17

Rata-rata	28	26	24	22	21
AHH					
Laki-laki	68,2	68,71	69,34	69,9	70,39
Perempuan	72,15	72,65	73,25	73,78	74,24
Rata-rata	70,23	70,74	71,35	71,9	72,37

## Ketenagakerjaan

Perkembangan angkatan kerja dapat direfleksikan dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Secara umum TPAK di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2001 sebesar 61,65 persen (lihat Tabel 2.7). Dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya, TPAK di Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan.

Peningkatan TPAK ini tampaknya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara yang "memaksa" penduduk usia kerja lebih banyak aktif secara ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Kondisi ekonomi yang mulai pulih sejak tahun 1999 yang ditandai dengan meningkatnya kinerja lapangan usaha riil, seperti industri, konstruksi, perdagangan dan sebagainya ternyata secara signifikan membantu para pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan. Dengan demikian lebih banyak penduduk yang terlibat aktif secara ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana krisis ekonomi mulai menerpa negara kita.

**Tabel 2.7**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 1997-2001**

TPAK	1997	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	79,03	76,26	78,17	80,74	80,82

Perempuan	39,72	40,53	42,78	42,75	42,9
<b>Total</b>	<b>58,99</b>	<b>58,16</b>	<b>60,78</b>	<b>61,64</b>	<b>61,65</b>

Selanjutnya, berdasarkan lapangan pekerjaan, terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa dan industri pengolahan. Penyerapan penduduk yang bekerja di tiga lapangan pekerjaan tersebut di samping bekerja pada lapangan kerja formal, juga informal misalnya pada industri kecil dan kerajinan rumah tangga, pedagang asongan/ kakilima, reparasi/bengkel, penjahit, salon dan sebagainya.

**Tabel 2.8.**  
**Distribusi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan**

Lapangan Pekerjaan	1997	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	0,2	0,9	0,7	0,2	0,8
2. Industri Pengolahan	18,8	16,5	17,4	20,4	21,2
3. Bangunan	5,4	5,1	4,1	4,4	3,8
4. Perdagangan, Hotel & Restoran	32,3	33,7	34,7	37,3	34,9
5. Pengangkutan & Komunikasi	8,3	7,5	7,5	8,8	8,6
6. Keuangan	4,6	5,7	5,0	6,0	5,9
7. Jasa-jasa	29,3	30,0	29,9	22,0	32,0
8. Lainnya	1,1	0,6	0,7	0,9	1,8
<b>Jumlah</b> <b>(Ribu orang)</b>	<b>100,0</b> <b>(3.222,3)</b>	<b>100,0</b> <b>(8.146,8)</b>	<b>100,0</b> <b>(3.180,6)</b>	<b>100,0</b> <b>(3.426,7)</b>	<b>100,0</b> <b>(3.452,4)</b>

Dilihat dari sisi pendidikan, pendidikan seseorang sangat berpengaruh dalam proses peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kesejahteraan, hidupnya. Oleh karena itu apabila "bekal pendidikan" penduduk, termasuk angkatan kerja yang ada relatif rendah (SLTA ke bawah), maka peluang mendapatkan lowongan di lapangan pekerjaan formal dengan produktivitas tinggi menjadi terbatas.

**Tabel 2.9.**  
**Distribusi Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan**  
**Tahun 1997-2001 (Persen)**

<b>Pendidikan yang Ditatamatkan</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Maksimal SD	26,0	30,5	30,3	27,3	27,0
2. SLTP	18,4	18,1	18,2	16,8	18,4
3. SLTA	43,0	37,3	37,6	40,8	40,3
4. DI ke atas	12,6	14,1	13,9	15,1	14,3
<b>Jumlah (Ribu orang)</b>	<b>100,0 (3.222,3)</b>	<b>100,0 (3.146,8)</b>	<b>100,0 (3.180,6)</b>	<b>100,0 (3.426,7)</b>	<b>100,0 (3.452,4)</b>

Dengan demikian upaya meningkatkan SDM dapat dilakukan melalui peningkatan *human capital* pada aspek pendidikan. Apabila dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, maka jumlah terbesar penduduk yang bekerja di Propinsi DKI Jakarta adalah tamatan SLTA, diikuti oleh mereka yang hanya berpendidikan maksimal SD, SLTP dan D1 ke atas (lihat Tabel 2.9).

### **Transportasi**

Mobilitas masyarakat yang tinggi merupakan salah satu ciri khas Jakarta sebagai kota metropolitan, yang sekaligus merupakan pusat kegiatan perekonomian dan perdagangan. Kebutuhan akan laju pergerakan yang tinggi ini, bersamaan dengan membaiknya keadaan ekonomi, menyebabkan makin tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor.

### **Kendaraan Bermotor**

Jumlah kendaraan bermotor, tidak termasuk kendaraan TNI dan *Corps Diplomatic* di Propinsi DKI Jakarta dari tahun 1997 yaitu saat terjadi krisis ekonomi ke tahun 1998 mengalami penurunan drastis, sekitar 21 persen,

menjadi 3.053. ribu kendaraan dari 3.842.ribu kendaraan tahun 1997. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian, jumlah kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.10.).

**Tabel 2.10.**  
**Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 1997-2001**  
**(dalam ribuan)**

<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sepeda Motor	2.055	1.528	1.544	1.577	1.732
Mobil Penumpang	1.095	952	965	1.006	1.093
Mobil Beban	381	319	320	327	341
Mobil Bis	311	254	254	254	254
<b>Jumlah</b>	<b>3.842</b>	<b>3.053</b>	<b>3.083</b>	<b>3.164</b>	<b>3.420</b>

Terlalu banyaknya kendaraan yang lalu lalang dibandingkan dengan panjang jalan yang relatif tetap, menimbulkan makin banyak titik rawan kemacetan. Di samping itu terjadi pula pemborosan energi, meningkatnya polusi yang menyelimuti angkasa Jakarta, serta kerugian waktu yang diderita karena terjadinya kemacetan tersebut.

**Tabel 2.11.**  
**Perkembangan Jumlah Kendaraan Umum Bis Tahun 1997-2001**

<b>Jumlah Bis</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bis Besar	5.038	5.258	5.419	5.243	4.522
Bis Sedang	4.977	4.981	4.981	4.981	4.979
Bis Kecil	11.604	11.832	11.847	11.865	12.063

<b>Jumlah</b>	<b>21.619</b>	<b>22.071</b>	<b>22.247</b>	<b>22.089</b>	<b>21.564</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### **Panjang Jalan**

Peningkatan panjang dan luas jalan, serta pembangunan *fly over* dan *under pass* merupakan alternatif lain untuk menanggulangi kemacetan yang timbul. Akan tetapi karena terbatasnya lahan, maka pertumbuhan panjang jalan sangat kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Sebagai gambaran, dengan menganggap rata-rata panjang kendaraan bermotor 2,5 meter, apabila kendaraan tersebut dijejerkan berurutan maka diperlukan jalan sepanjang 7.908 kilometer.

**Tabel 2.12.**  
**Perkembangan Panjang Jalan Tahun 1997-2001 (Km)**

<b>Jenis Jalan</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Daerah	6.160	6.262	6.262	6.374	6.374
Lainnya	154	154	154	154	154
<b>Jumlah</b>	<b>6.314</b>	<b>6.416</b>	<b>6.416</b>	<b>6.528</b>	<b>6.528</b>

### **GAMBARAN EKONOMI PROPINSI DKI JAKARTA**

PDRB memberi informasi tentang besarnya aktivitas produktif masyarakat, dan dengan demikian juga kemakmuran ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Jika data ini tersaji menurut perkembangan waktu dan pengaruh harga telah dihilangkan, maka kita dapat mengetahui informasi tentang perkembangan aktivitas produktif dan kemakmuran tersebut secara riil (nyata). Dan jika data ini dihadapkan dengan data penduduk maka informasi tentang kemakmuran rata-rata dari setiap penduduk juga dapat diketahui.

Potensi ekonomi Propinsi DKI Jakarta termasuk paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, sebagaimana terlihat dari besarnya kontribusi PDRB-nya terhadap PDB Indonesia, yang pada tahun 1999 mencapai 15.027 persen dan 16.502 persen pada tahun 1996. Sebagaimana diketahui bahwa PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

### Perkembangan PDRB 1993-2000

Pada **Tabel 2.13** terlihat perkembangan PDRB Propinsi DKI Jakarta pada masa sebelum maupun pada masa krisis ekonomi (Tahun 1993 sampai dengan 2000). Data tersebut disajikan dalam harga berlaku. Menurut harga berlaku, total PDRB terus berkembang dari Rp 51,1 triliun rupiah pada tahun 1993 menjadi Rp 188 triliun pada tahun 2000. Tiga sektor yang mendominasi perolehan pendapatan, yakni industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran serta lembaga keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan.

**Tabel 2.13.**  
**Perkembangan PDRB Propinsi DKI Jakarta Menurut Sektor,**  
**Dalam Harga Berlaku (Milyar Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	TAHUN							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Pertanian	144	141	151	167	188	293	338	413
2	Pertambangan & Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	10,709	12,340	14,854	17,102	19,589	29,193	38,409	43,946
4	Listrik, Gas & Air Bersih	900	1,022	1,124	1,294	1,537	1,728	2,078	2,306
5	Bangunan	6,651	7,981	9,826	12,440	14,680	15,259	19,646	23,144
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	11,317	12,963	15,230	17,891	20,558	32,843	38,809	43,869
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	4,446	4,858	5,707	7,014	7,915	9,258	12,337	14,285
8	Keuangan, Sewa Bangunan & Jasa Perusahaan	11,571	13,567	16,175	18,469	22,806	37,146	36,583	42,255
9	Jasa-Jasa Sosial Kemasyarakatan	5,369	5,913	6,979	8,210	9,377	12,843	16,070	17,818
	<b>Total PDRB</b>	<b>51,106</b>	<b>58,785</b>	<b>70,045</b>	<b>82,587</b>	<b>96,651</b>	<b>138,564</b>	<b>164,269</b>	<b>188,036</b>

Sekalipun PDRB pada harga berlaku tahun 2000 sebesar 3.86 kali dari angka pada tahun 1993, tidak berarti kesejahteraan masyarakat DKI melipat sebesar itu selama 1993 sampai dengan 2000. Sebab, pengukuran perkembangan derajat kesejahteraan harus didasarkan pada angka pendapatan secara riil. Dalam hal ini pendapatan riil dapat diukur oleh PDRB harga konstan.

Pada Tabel 2.14 dicantumkan angka PDRB riil menurut sektor (lapangan usaha) yang dihitung atas harga konstan 1993. Pada tahun 1993 PDRB Propinsi DKI Jakarta barulah Rp 51 triliun, lalu di tahun menjelang krisis ekonomi (1997) meningkat menjadi Rp 69,5 triliun; dengan demikian artinya kemakmuran masyarakat DKI secara riil naik dengan 8,3 % rata-rata per tahunnya. Di tahun krisis PDRB ini turun menjadi Rp 57 triliun (tahun 1998) dan Rp 57,2 triliun (tahun 1999). Dengan demikian kemakmuran ekonomi masyarakat Propinsi DKI Jakarta pun turun akibat krisis ekonomi itu. Selanjutnya pada tahun 2000, PDRB meningkat menjadi Rp 59,5 triliun atau meningkat dengan 5,12% jika dibandingkan tahun 1999. Berdasarkan harga konstan, pendapatan riil yang berasal dari aktivitas ekonomi DKI meningkat sebesar 17,29 % dalam periode 1993-2000. Peningkatan sedemikian itu tergolong kecil, jika dibandingkan dengan tahun 1995 pendapatan riil pada tahun 2000, sedikit lebih rendah dari pendapatan riil tahun 1995.

**Tabel 2.14.**  
**Perkembangan PDRB Propinsi DKI Jakarta, Menurut Sektor**  
**Dalam Harga Konstan 1993 (Milyar Rp)**

No.	Lapangan Usaha	TAHUN							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Pertanian	144	125	123	122	123	105	117	116
2	Pertambangan & Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	10,709	11,651	12,865	13,918	14,718	12,073	12,391	12,875
4	Listrik, Gas & Air Bersih	900	974	1,009	1,071	1,210	1,103	1,161	1,226

5	Bangunan	6,651	7,596	8,783	10,135	10,678	6,589	6,405	6,470
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	11,317	12,318	13,664	15,044	15,922	13,466	13,550	14,166
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	4,446	4,668	5,101	5,620	6,009	5,288	5,614	6,042
8	Keuangan, Sewa Bangunan & Jasa Perusahaan	11,571	12,592	13,326	14,341	14,954	13,516	12,682	13,168
9	Jasa-Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	5,369	5,581	5,776	5,913	5,929	5,240	5,295	5,429
	Total PDRB DKI	51,106	55,505	60,649	66,165	69,543	57,381	57,215	59,492
	Total PDB INDONESIA	329,776	354,641	383,792	413,798	433,246	376,375	379,353	397,934

## Komposisi PDRB

Sebagai sebuah kota metropolitan maka tidaklah heran jika peran sektor pertanian dan pertambangan serta galian dalam perekonomian Propinsi DKI Jakarta amat tidak signifikan, dan sebaliknya peran sector industri manufaktur serta jasa amat signifikan. Peran sektor jasa terutama perdagangan, hotel dan restoral serta jasa lembaga keuangan bahkan lebih besar dari peran sektor industri manufaktur. Perihal peran yang disebutkan terakhir ini sungguh sesuai dengan tekad Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai kota jasa (*service city*). Yang paling pokok adalah sektor jasa yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat ini sebaiknya sektor jasa modern dan bukan tradisional.

Perekonomian Propinsi DKI Jakarta didominasi oleh sektor tersier<sup>1</sup>, (lihat Tabel 2.15). Peran sektor tersier atau aktivitas ekonomi yang berbasis pelayanan akan semakin memegang peranan dan kunci penting dalam menopang perekonomian. Kontribusi sektor tersier cenderung terus meningkat, kecuali ketika krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, kontribusinya sedikit menurun,

1

Sektor Primer : Sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian, Sektor Sekunder : Sektor Industri Pengolahan dan Bangunan, Sektor Tersier : Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Angkutan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan dan Jasa-jasa Perusahaan ; dan Sektor Jasa-jasa.

namun kemudian meningkat kembali sejak tahun 1999 pada level baru yakni di atas 66%. Pada sisi lain sektor sekunder yang dihuni oleh sektor industri pengolahan, kontribusinya cenderung menurun dalam periode 1993-2000, namun sempat mengalami sedikit kenaikan pada periode krisis 1997-1998. Sedangkan sektor primer yang dihuni oleh kegiatan pertanian, andilnya terus menurun. Hal ini selain disebabkan oleh semakin tidak kompetitifnya kegiatan pertanian tradisional di Jakarta, juga sebagian besar lahan pertanian terdesak oleh penggunaan lain di luar kegiatan pertanian.

**Tabel 2.15.**  
**Komposisi PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha (dalam %)**

Sektor (Lapangan Usaha)	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	0.28	0.23	0.20	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	20.95	20.99	21.21	21.04	21.16	21.04	21.66	21.64
Listrik, Gas dan Air Minum	1.76	1.76	1.66	1.62	1.74	1.92	2.03	2.06
Bangunan	13.01	13.68	14.48	15.32	15.35	11.48	11.19	10.88
Perdagangan, Hotel dan Restoran	22.14	22.19	22.53	22.74	22.90	23.47	23.68	23.81
Pengangkutan dan Komunikasi	8.70	8.41	8.41	8.49	8.64	9.22	9.81	10.16
Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	22.64	22.69	21.97	21.68	21.50	23.55	22.17	22.13
Jasa-jasa Sosial dan Kemasyarakatan	10.51	10.05	9.52	8.94	8.53	9.13	9.25	9.13
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Primer	0.28	0.23	0.20	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19
Sekunder	33.97	34.68	35.70	36.35	36.52	32.52	32.85	32.52
Tersier	65.75	65.10	64.10	63.46	63.30	67.29	66.94	67.29
<b>PDRB DKI terhadap PDB Nasional</b>	<b>15.50</b>	<b>15.65</b>	<b>15.80</b>	<b>15.99</b>	<b>16.05</b>	<b>15.25</b>	<b>15.08</b>	<b>14.95</b>

Sumber pendapatan utama masyarakat Propinsi DKI Jakarta adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, kemudian diikuti oleh sektor keuangan,

persewaan bangunan dan jasa perusahaan. Pendapatan yang diperoleh sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan trend yang meningkat dengan kontribusi sebesar 22% - 24%. Hal ini berarti sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Besarnya kontribusi sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan periode 1993-2000 adalah 22-23%.

Sumber pendapatan andalan berikutnya bagi masyarakat adalah sektor sekunder, yaitu industri pengolahan (industri manufaktur) dan bangunan. Industri manufaktur memberikan kontribusi sekitar 21% dalam periode 1993-2000. Namun tingginya peran sektor industri manufaktur pada gilirannya menjadi bumerang pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi, sehingga Propinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang paling parah terpengaruh oleh krisis. Dalam waktu ke depan, peran industri pengolahan di Propinsi DKI Jakarta diperkirakan akan menurun. Hal ini disebabkan oleh diantaranya: (1) peningkatan sektor industri di daerah lain (Botabek), baik akibat investasi baru maupun akibat adanya relokasi industri dari Jakarta, karena harga lahan di Bodetabek jauh lebih murah daripada di Propinsi DKI Jakarta, dan (2) biaya transportasi dan waktu tempuh dari lokasi Bodetabek ke Jakarta menjadi tidak signifikan, karena ditunjang oleh tersedianya jalan-jalan tol. Disamping itu, kebijakan jangka panjang pemerintah daerah yang menghendaki sektor jasa menjadi andalan ekonomi Jakarta.

Sedangkan sektor bangunan sebagai sektor penunjang bagi kegiatan industri manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran, lembaga keuangan dan jasa-jasa perusahaan, telah memberikan kontribusi antara 10-15% bagi pendapatan masyarakat dalam periode tersebut.

Pendapatan sektor jasa lainnya meskipun kontribusinya cenderung menurun, tetapi sektor ini masih memberikan kontribusi sekitar 8-10%. Kemudian sektor yang memberikan kontribusi kecil bagi pendapatan masyarakat Propinsi DKI Jakarta adalah sektor listrik, Gas dan Air Minum dan sektor angkutan dan komunikasi.

## Laju Pertumbuhan PDRB

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat bisnis nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan menjadi salah satu andalan Propinsi DKI Jakarta. Arus barang dari dan ke luar negeri banyak yang harus melewati pelabuhan di Jakarta. Demikian pula arus barang dari daerah-daerah yang akan didistribusikan ke daerah lain banyak yang harus melewati Jakarta. Disamping dijadikan tempat transitnya dari lalu lintas barang antar daerah, volume perdagangan di Jakarta sangat tinggi seiring dengan padatnya penduduk Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan perdagangan demikian itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, dengan laju pertumbuhan tinggi dari pertumbuhan secara nasional. Untuk menopang kegiatan perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya, jasa perhotelan dan restoran pun mengalami permintaan yang sangat tinggi. Bersama-sama dengan kegiatan perdagangan, kegiatan jasa perhotelan dan restoran mengalami perkembangan yang lebih pesat dibanding di tingkat nasional, yang pada periode sebelum krisis (1997) laju pertumbuhannya mencapai angka 8-10% per tahun (lihat Tabel 2.16). Untuk periode yang sama pertumbuhan di tingkat nasional berkisar 6-8% per tahun.

**Tabel 2.16.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB menurut Sektor,**  
**Periode 1994-2000, Dalam (%)**

<b>Sektor Lapangan Usaha</b>	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	-13.49	-1.53	-0.70	1.08	-15.00	11.33	-0.96
Industri Pengolahan	8.80	10.42	8.18	5.75	-17.97	2.63	3.91
Listrik, Gas dan Air Minum	8.21	3.59	6.13	12.93	-8.81	5.25	5.57
Bangunan	14.20	15.64	15.39	5.35	-38.29	-2.80	1.02
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.84	10.93	10.10	5.84	-15.42	0.62	4.54
Pengangkutan dan Komunikasi	5.01	9.26	10.17	6.92	-11.99	6.16	7.63
Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	8.83	5.83	7.62	4.27	-9.62	-6.17	3.83
Jasa-jasa Sosial dan Kemasyarakatan	3.95	3.50	2.36	0.28	-11.63	1.05	2.53

PDRB DKI	8.61	9.27	9.10	5.11	-17.49	-0.29	3.98
PDB Nasional	7.54	8.22	7.82	4.70	-13.13	0.79	4.90

Selanjutnya sejak krisis ekonomi (1997) kegiatan sektor perdagangan, hotel dan restoran terpuruk sekali, dengan laju pertumbuhan  $-15.42\%$  tahun 1998, kemudian bangkit perlahan-lahan menjadi  $0.62\%$  dan  $4.54\%$  masing-masing untuk tahun 1999 dan 2000.

Kegiatan ekonomi penyumbang pendapatan kedua terbesar di Propinsi DKI Jakarta adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yang pada periode sebelum krisis mengalami perkembangan moderat sekitar  $4.2 - 8.8\%$ . Angka pertumbuhan ini berada di bawah tingkat nasional yang berkisar antara  $6-11\%$ . Semenjak krisis, sektor ini sulit dipulihkan akibat belum normalnya kegiatan sektor riil. Sebab bagaimanapun juga, jasa yang diberikan oleh sektor ini sangat bergantung pada maju-mundurnya kegiatan sektor riil.

Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa kemajuan sektor-sektor tersier sangat bergantung pada pergerakan sektor sekunder (industri manufaktur). Sedangkan kegiatan industri manufaktur, yang menyumbang pendapatan ketiga terbesar di Jakarta pada umumnya menghadapi banyak kendala. Disamping kendala ongkos produksi juga dihadapkan pada persoalan lingkungan. Oleh karena itu, secara perlahan-lahan industri yang kurang ramah lingkungan merelokasikan kegiatannya ke luar Jakarta namun masih di sekitar wilayah ekonomi Jakarta. Akibatnya laju perkembangan industri manufaktur di Jakarta melambat, sehingga berada di bawah angka laju pertumbuhan nasional. Pada periode 1993-1996, meraih laju pertumbuhan  $8-10\%$ . Kemudian jatuh hingga  $-17.97\%$  pada tahun 1998, dan mulai bangkit tahun 1999 dan 2000, masing-masing dengan laju  $2.63$  dan  $3.91\%$ .

Sebagai kota pusat bisnis dan pemerintahan, permintaan akan akan sektor bangunan selalu meningkat dengan laju peningkatan di atas sektor-sektor lainnya. Oleh karena sektor bangunan, yang menyumbang pendapatan keempat terbesar, mengalami kemajuan paling pesat sebelum tahun 1997, dengan laju pertumbuhan tidak kurang dari  $14\%$  per tahun. Namun sejalan

dengan memburuknya ekonomi karena krisis permintaan akan bangunan menurun drastis, maka pada tahun 1998 sektor bangunan terpuruk hingga – 38.29%.

Sektor berikutnya yang memberikan andil pendapatan kelima terbesar adalah jasa-jasa. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang relatif rendah, yakni berkisar antara 2-4% per tahun. Dapat dimaklumi karena kelompok jasa ini terdiri atas jasa rumah tangga jasa-jasa kemasyarakatan yang perkembangannya kurang ekspansif dan cenderung berskala kecil.

Jasa angkutan dan komunikasi bukan lagi dikelompokkan sebagai kebutuhan sekunder, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua pelaku ekonomi di Jakarta. Arus pergerakan barang dari produsen menuju konsumen dan arus pergerakan manusia dalam menjalankan bisnisnya mutlak membutuhkan sarana angkutan atau transportasi, baik berupa kendaraan darat, laut maupun udara. Demikian pula pertukaran informasi antar pelaku bisnis, membutuhkan sarana komunikasi seperti telepon, Faximile, Telegram, dan jasa internet. Oleh karena itu, kebutuhan jasa ini akan bergerak secara paralel dan serentak dengan meningkatnya aktifitas bisnis di Jakarta. Sebelum krisis, sektor yang menyumbang pendapatan keenam terbesar ini berkembang hampir selalu di atas laju perkembangan nasional dan pernah mencapai angka 10% pada tahun 1996. Pada masa pemulihan ekonomi, sektor ini paling cepat pulih dan mampu mencapai laju pertumbuhan 6.16% tahun 1999 dan 7.63% tahun 2000.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yaitu berkisar antara antara 8-10 % per tahun pada periode sebelum krisis. Pada masa pemulihan ekonomi, sektor ini mengalami pemulihan yang paling cepat setelah sektor angkutan dan komunikasi.

Pertanian adalah sektor yang paling kecil memberikan andil bagi perekonomian Jakarta dan perkembangannya hampir selalu menurun dari tahun ke tahun selama periode 1993 – 2000.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan selama periode sebelum krisis ekonomi, selalu di atas laju pertumbuhan nasional.

Namun sejak 1998 hingga 2000, ekonomi Propinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya pulih, sehingga pertumbuhannya masih di bawah nasional. Jika ditelusuri secara sektoral, hampir semua sektor mengalami keterlambatan dibandingkan dengan kebangkitan sektoral di daerah. Hal ini mudah dipahami, bahwa kemajuan ekonomi di daerah yang didominasi oleh sektor barang (sektor riil) akan menarik kemajuan Jakarta yang didominasi oleh sektor jasa-jasa dan keuangan. Oleh karenanya ada *lag* atau keterlambatan waktu antara pulihnya perekonomian di daerah dan di Jakarta.

### **PDRB Per Kapita**

Seperti dikemukakan di atas, PDRB per kapita atau PDRB dibagi dengan jumlah penduduk menunjukkan besarnya rata-rata kemakmuran ekonomi (material) per penduduk. Tabel 2.17 di bawah ini menyajikan gambaran tentang kemakmuran ekonomi per penduduk ini di Propinsi DKI Jakarta.

**Tabel 2.17.**  
**PDRB per Kapita Propinsi DKI Jakarta, Periode 1993-2000**  
**(dalam juta rupiah)**

PDRB/PDB per Kapita	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PDRB per kapita DKI	6.18	7.09	8.43	9.92	11.59	16.59	19.62	22.42
Harga Berlaku								
PDRB per kapita DKI	6.18	6.69	7.30	7.95	8.34	6.87	6.84	7.09
Harga Konstan 1993								
PDB Nasional Harga	1.75	1.85	1.97	2.10	2.18	1.87	1.86	1.92
Konstan 1993								

Jika PDRB per kapita dalam harga berlaku selalu menaik, maka PDRB per kapita dalam harga konstan dapat menaik dan dapat juga menurun. PDRB perkapita dalam harga konstan dalam periode 1993-1997 terus meningkat, artinya pada masa itu kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat Propinsi DKI Jakarta terus membaik. Ketika badai krisis menghantam ekonomi Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan Propinsi DKI Jakarta khususnya menjadi terpuruk, bahkan belum pulih hingga tahun 2000 sekalipun. Hal ini ditunjukkan oleh angka PDRB perkapita tahun 2000 (yakni Rp 7,095

juta), yang masih lebih rendah daripada PDRB per kapita tahun 1995. Artinya tingkat kesejahteraan masyarakat Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2000 lebih rendah daripada tahun 1995.

### **PDRB Menurut Pengeluaran**

Perkembangan PDRB, yang dibicarakan di bawah ini berkait erat dengan perkembangan pada pengeluaran agregat. Pada prinsipnya aktivitas produktif masyarakat tidak akan pernah berkembang bila hasil dari aktivitas produktif tersebut, yaitu barang atau jasa akhir, tidak terjual. Nilai penjualan dari barang atau jasa akhir hasil kegiatan produktif tersebut tercermin pada besarnya pengeluaran agregat masyarakat.

### **Perkembangan PDRB**

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari semua komponen permintaan akhir seperti: 1) Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga dan Swasta nirlaba, 2) Konsumsi Pemerintah, 3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, 4) Perubahan Stok, dan 5) Ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep pendekatan pendapatan dan pengeluaran memberikan jumlah yang sama, antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang akhir yang dihasilkan. PDRB pengeluaran agregat masyarakat Propinsi DKI Jakarta dalam harga berlaku dari tahun 1993-2000 dicantumkan pada Tabel 2.18.

**Tabel 2.18.**  
**PDRB Propinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran**  
**Dalam Harga Berlaku, Periode 1993-2000 (milyar rupiah)**

No.	PENGELUARAN AGREGAT	TAHUN							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Penglmn Konsumsi Rumah Tangga	21,658	26,378	31,692	37,178	42,059	61,922	72,509	78,561
2	Penglmn Konsumsi Swasta Nonlaba	76	88	105	125	137	195	285	312
3	Penglmn Konsumsi Pemerintah	3,519	3,755	4,432	4,859	4,785	6,360	7,726	9,310
4	Pmbntkn Modal Tetap Dmstk Brt	23,811	27,519	33,291	39,835	43,144	46,584	59,312	69,837
5	Perubahan Stok	1,566	-906	-1,765	-1,821	-3,100	1,182	2,056	3,878
6	Ekspor Netto:	476	1,951	2,289	2,410	9,627	22,421	22,421	26,137
	a. Ekspor barang & jasa	28,575	32,950	38,173	45,320	55,571	93,958	84,660	107,592
	b. Impor barang & jasa	28,099	30,999	35,884	42,910	45,944	71,537	62,239	81,455
	Total PDRB	51,106	58,785	70,045	82,587	96,651	138,664	164,309	188,036

Sedangkan pada Tabel 2.19 dicatat angka pengeluaran agregat dalam harga konstan 1993, yaitu volume barang dan jasa yang dinilai oleh harga yang terjadi pada tahun 1993. Angka pengeluaran agregat harga konstan selalu lebih kecil daripada harga berlaku, karena telah meniadakan faktor inflasi. Perlu dikedepankan disini bahwa menurut harga berlaku, total pengeluaran agregat pada tahun 1998, 1999, dan 2000 jauh lebih besar daripada angka yang terjadi pada tahun 1997. Sebaliknya menurut harga konstan, total pengeluaran agregat pada ketiga tahun terakhir tersebut lebih kecil daripada angka yang terjadi pada tahun 1997. Artinya dilihat dari nilai uangnya, pengeluaran masyarakat DKI pada tahun 1998-2000 lebih besar daripada tahun 1997. Sedangkan jika dilihat dari volumenya, maka barang dan jasa yang dibeli pada tahun 1998, 1999, dan 2000 jauh lebih sedikit daripada yang terjadi tahun 1997. Sebagai konsekuensinya kesejahteraan masyarakat pada tahun 1998-2000 jauh lebih rendah daripada kesejahteraan pada tahun 1997.

**Tabel 2.19.**  
**PDRB Propinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran**  
**Dalam Harga Konstan 1993 , Periode 1993-2000 (milyar rupiah)**

No.	PENGELUARAN AGREGAT	TAHUN							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Penglrn Konsumsi Rumah Tangga	21,658	24,057	26,003	27,815	30,313	26,249	28,078	29,025
2	Penglrn Konsumsi Swasta Nonlaba	76	80	81	88	95	97	100	102
3	Penglrn Konsumsi Pemerintah	3,519	3,543	3,741	3,581	2,861	2,326	2,292	2,383
4	Pmbntkn Modal Tetap Dmstk Brt	23,811	26,365	29,433	32,700	33,749	21,421	20,977	21,337
5	Perubahan Stok	1,566	-727	-1,087	-1,656	-2,094	601	1,097	1,855
6	Ekspor Netto:	475	2,187	2,479	3,635	4,620	6,687	4,671	4,791
No.	PENGELUARAN AGREGAT	TAHUN							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	a. Ekspor barang & jasa	28,575	31,160	34,427	38,860	39,187	34,467	27,298	28,630
	b. Impor barang & jasa	28,099	28,973	31,948	35,224	34,566	27,780	22,627	23,839
	Total PDRB	51,106	55,505	60,649	66,165	69,543	57,381	57,215	59,492
	Total PDB INDONESIA	329,776	354,641	383,792	413,798	433,246	376,375	379,353	397,934

### **Komposisi Pengeluaran**

Diantara komponen pengeluaran agregat, pengeluaran yang terbesar adalah investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto ditambah dengan perubahan stok), terutama di waktu sebelum krisis berlangsung, yakni 46-50%. Peranan investasi dalam menggerakkan perekonomian semakin mengendur

setelah Indonesia dihantam badai krisis ekonomi, yakni 35-37% (lihat Tabel 2.20).

Pengeluaran rumah tangga memberikan andil kedua terbesar dalam mendorong perekonomian Jakarta. Dalam kurun waktu 1993-2000, memberikan andil dalam penciptaan output barang dan jasa antara 42-49%. Sementara pengeluaran dari pihak lembaga Swasta nirlaba hanya memberikan andil kurang dari 1% selama periode tersebut.

Kegiatan ekspor barang dan jasa adalah pendorong perekonomian Jakarta cukup besar, dan selama 1993-2000, kegiatan ini memberikan andil 48-60% dari total pengeluaran agregat. Pada masa puncak krisis ekonomi (1998), nilai rupiah terdepresiasi secara hebat, sehingga memberikan keuntungan komparatif yang besar untuk kegiatan ekspor. Pada saat itu 60% pengeluaran agregat didorong sepenuhnya oleh kegiatan ekspor barang dan jasa. Akan tetapi jika dilihat dari ekspor neto (ekspor dikurang impor), maka andilnya kurang dari 10% dari total pengeluaran agregat. Ekspor neto memberikan andil paling besar ketika masa puncak krisis ekonomi tahun 1998, sekitar 11 persen.

Untuk memenuhi permintaan rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan ekspor membutuhkan barang-barang dan jasa yang berasal dari luar negeri. Selama periode 1993-2000, nilai barang yang diimpor secara rata-rata menyedot sekitar 50% dari pendapatan Propinsi DKI Jakarta.

Permintaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pertahanan semakin menurun. Pada tahun 1993 permintaan pemerintah mampu mendorong penciptaan output hampir 7%, kemudian menurun terus hingga andilnya hanya 4% pada tahun 2000.

Secara keseluruhan keadaan sisi permintaan perekonomian Jakarta menunjukkan kecenderungan yang kurang normal pada periode 1997-2000. Dengan semakin tingginya pendapatan per kapita, diharapkan konsumsi rumah tangga menurun, sementara investasi dan ekspor meningkat. Namun dalam periode itu terjadi pola dimana konsumsi rumah tangga meningkat, sementara investasi menurun secara signifikan. Pada gilirannya nilai ekspor pun sejak 1998

relatif menurun yang mungkin disebabkan oleh menurunnya investasi sektor swasta. Walaupun demikian, dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, kinerja ekspor Propinsi DKI Jakarta masih lebih baik. Namun perlu diingat, komoditas yang diekspor oleh Propinsi DKI Jakarta, mengandung komoditas yang dihasilkan daerah lain.

**Tabel 2.20.**  
**Komposisi PDRB Menurut Pengeluaran**  
**Propinsi Propinsi DKI Jakarta, Periode 1993-2000, dalam (%)**

No.	PENGELUARAN AGREGAT	TAHUN							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Penglrn Konsumsi Rumah Tangga	42.38	43.34	42.88	42.04	43.59	45.74	49.07	48.79
2	Penglrn Konsumsi Swasta Nonlaba	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.17	0.17	0.17
3	Penglrn Konsumsi Pemerintah	6.89	6.38	6.17	5.41	4.11	4.05	4.01	4.01
4	Pmbntkn Modal Tetap Dmstk Brt	46.59	47.50	48.53	49.42	48.53	37.33	36.66	35.86
5	Perubahan Stok	3.07	-1.31	-1.79	-2.50	-3.01	1.05	1.92	3.12
6	Ekspor Netto:	0.93	3.94	4.09	5.49	6.64	11.65	8.16	8.05
	a. Ekspor barang & jasa	55.91	56.14	56.76	58.73	56.35	60.07	47.71	48.12
	b. Impor barang & jasa	54.98	52.20	52.68	53.24	49.70	48.41	39.55	40.07
	Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Dengan melihat perkembangan PDRB dari sisi pengeluaran ini maka kian jelas bahwa Propinsi DKI Jakarta adalah suatu kota jasa. Kendati ekspor neto, seperti disebut di atas kecil (10% dari total pengeluaran agregat), namun angka yang kecil ini tidak lain karena hampir berimbangny hasil dari kegiatan ekspor dan impor. Nilai tambah ekspor dan impor itu sendiri dibandingkan dengan PDRB sesungguhnya amat besar. Di saat sebelum krisis rasio kedua pengeluaran ini terhadap PDRB masing-masing sekitar 50% lebih.

### **Pertumbuhan Pengeluaran PDRB**

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan pengeluaran, maka nilai belanja barang

dan jasa untuk keperluan rumah tangga berkembang paling pesat (lihat Tabel 2.21). Selama periode 1993–1997 permintaan ini meningkat dengan rata-rata 8.77% per tahun, kemudian anjlok drastis tahun 1998, namun melompat ke angka 6.97% pada tahun 1999 dan sedikit berkurang menjadi 3.37% pada tahun 2000. Secara rata-rata pada periode 1993-2000 tumbuh sebesar 4.31% per tahun.

**Tabel 2.21.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ,**  
**Propinsi DKI Jakarta, Periode 1994-2000, Dalam (%)**

No.	PENGELUARAN AGREGAT	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Penglrn Konsumsi Rumah Tangga	11.08	8.09	6.97	8.98	-13.41	6.97	3.37
2	Penglrn Konsumsi Swasta Nonlaba	5.49	0.78	9.63	7.16	2.21	2.83	1.94
3	Penglrn Konsumsi Pemerintah	0.67	5.58	-4.27	-20.11	-18.70	-1.44	3.96
4	Pmbntkn Modal Tetap Dmstk Brt	10.72	11.64	11.10	3.21	-36.53	-2.07	1.72
5	Perubahan Stok	-146.39	49.61	52.31	26.46	-128.70	82.58	69.03
6	Ekspor Netto:	359.96	13.33	46.68	27.09	44.74	-30.14	2.55
	a. Ekspor barang & jasa	9.05	10.48	12.88	0.84	-12.04	-20.80	4.88
	b. Impor barang & jasa	3.11	10.27	10.25	-1.87	-19.63	-18.55	5.36
	Total PDRB	8.61	9.27	9.10	5.11	-17.49	-0.29	3.98

Ekspor barang dan jasa berkembang paling pesat baik sebelum maupun selama krisis ekonomi. Pada kurun waktu 1993-2000 tumbuh dengan laju antara 9.5-12.9%. Kemudian karena terjadi depresiasi rupiah yang mendadak, sehingga sulit diantisipasi oleh dunia usaha, berakibat pada ekspor Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 hampir tidak bertambah, bahkan menurun 12% pada tahun 1998. Selanjutnya dengan memanfaatkan nilai rupiah yang *undervalued* permintaan ekspor pada tahun 2000 mengalami kenaikan paling besar dibanding permintaan untuk pengeluaran lainnya, yaitu sebesar 4.9%.

Permintaan barang untuk investasi atau pembentukan modal tetap domestik bruto, pada era sebelum krisis mengalami laju pertumbuhan paling

tinggi, yaitu berkisar dari 11 – 16% pada periode 1993-1996. Akibat krisis ekonomi, penambahan permintaan barang untuk investasi mengalami laju yang menurun. Bahkan pada tahun 1998, permintaan barang untuk investasi mengalami penurunan sebesar 36.53%. Pada tahun 1999, laju pertumbuhan investasi masih negatif dan penambahannya baru positif pada tahun 2000. Dengan melambatnya permintaan barang untuk investasi pada tahun 2000, maka perekonomian pada beberapa tahun mendatang sangat bergantung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor.

## **Perkembangan Inflasi**

Salah satu indikator penting dalam pengendalian sektor ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi, Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peran kebijakan pemerintah, bahkan lebih luas lagi berkait dengan perilaku sektor moneter. Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Sejak bulan April 1998 penghitungan inflasi mengalami perubahan metode, perubahan tersebut antara lain: a) inflasi nasional dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (1996=100) gabungan 44 kota, sebelumnya gabungan 27 kota. Paket komoditi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IHK mencakup sekitar 249 - 353 jenis barang dan jasa, sebelumnya mencakup sekitar 200 - 224 Jenis barang/jasa, c) Inflasi tahunan berdasarkan metode *point to point* yaitu persentase perubahan IHK bulan berjalan dengan bulan Desember tahun sebelumnya, bukan lagi berdasarkan metode kumulatif yaitu dengan menjumlahkan inflasi Januari sampai dengan bulan berjalan.

Tabel 2.22 menyajikan angka inflasi di Propinsi DKI Jakarta untuk kurun waktu 1997 -2001. Sebagaimana terlihat di tabel tersebut angka inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen adalah demikian tinggi di tahun-tahun ketika krisis ekonomi berlangsung. Angka tertinggi terjadi di tahun 1998, yaitu mencapai 75,2%. Kondisi ini tentu saja amat tidak menggembirakan bagi masyarakat Propinsi DKI Jakarta, dan bahkan masyarakat Indonesia

keseluruhan terutama yang hidup di kota-kota besar. Akibat dari inflasi yang tinggi ini mereka yang berpendapatan tetap, seperti pegawai negeri, tentu merosot tajam pendapatan riilnya. Pada tahun 2000 mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah terlihat dari laju inflasi yang cukup rendah. Tahun 1999 terjadi deflasi sebesar 0.97 persen, kemudian selama tahun 2000 terjadi inflasi di bawah 2 digit yakni 9.11%. Pada tahun 2001, terjadi gejolak politik di Ibukota, yang diakhiri oleh pergantian pimpinan nasional. Gejolak ini ditengarai sebagai salah satu yang memberikan andil negatif bagi perekonomian, yang ditandai oleh angka inflasi melewati 2 digit, yakni 11.32%. Kemudian suhu politik pada tingkat nasional dan khususnya di Ibukota sepanjang triwulan tahun 2002 sangat kondusif. Hal ini ditandai oleh angka inflasi sebesar 1.99%.

Selanjutnya, menguatnya nilai tukar rupiah secara signifikan dan terus menurunnya suku bunga perbankan telah memberikan pengaruh positif pada perkembangan kondisi ekonomi-moneter sampai dengan bulan Mei 2002. Dalam bulan-bulan mendatang laju inflasi secara tahunan diperkirakan akan menurun sementara nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung stabil dan menguat.

Menguatnya nilai tukar rupiah dan kecenderungan menurunnya tingkat inflasi memberikan peluang bagi penurunan suku bunga dan upaya-upaya menggerakkan roda perekonomian lebih lanjut.<sup>2</sup>

**Tabel 2.22.**  
**Perkembangan Laju Inflasi di Propinsi DKI Jakarta Periode 1997-2001,**  
**dalam Persen**

No.	Item Barang dan Jasa	1997	1998	1999	2000	2001	2002 <sup>2)</sup>
	<b>Inflasi di Indonesia :</b>	11.60	77.54	2.01	9.35	12.55	3.5
	<b>Inflasi di DKI :</b>	<b>11.28</b>	<b>75.21</b>	<b>-0.97</b>	<b>9.11</b>	<b>11.32</b>	<b>1.99</b>
1	Makanan	21.56	44.6	-12.71	2.48	11.26	3.77
2	Makanan Jadi, Minuman,	26.42	90.89	2.53	10.88	13.19	0.32

<sup>2</sup> Siaran Pers BI, No.4 /78 /BGgub/ Humas, 11 Juni 2002.

	Rokok dan Tembakau						
3	Perumahan	3.82	41.57	5.27	6.48	10.78	1.66
4	Sandang	6.21	59.36	-0.81	7.33	7.19	-0.17
5	Kesehatan	13.38	72.62	2.5	14.43	6.69	0.6
6	Pendidikan Rekreasi dan Olahraga	17.94	14.17	2.2	25.68	10.65	0.2
7	Transportasi dan Komunikasi	1.23	19.32	3.03	7.66	15.14	5.62

Catatan \*) sampai dengan Maret 2002

## Perbandingan Dengan Ekonomi Nasional

Menilai perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta sebagaimana semua yang tertera di atas akan lebih lengkap bila kita membandingkannya juga dengan ekonomi nasional atau rata-rata perkembangan ekonomi di seluruh propinsi di Indonesia. Dengan kata lain, prestasi rata-rata ekonomi seluruh propinsi di Indonesia kita jadikan patokan pengukur untuk menyatakan apakah perkembangan-perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta tersebut, selama kurun waktu analisis, dapat dikatakan baik atau sebaliknya. Ekonomi Propinsi DKI Jakarta sendiri, sebagai bagian dari ekonomi nasional, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional. Tetapi hal yang sebaliknya juga terjadi yaitu ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta.

Pada bagian ini akan dilakukan analisis "*Location Quotient*" (LQ), *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan Analisis "Shift-Share".

## Analisis Location Quotient

Location Quotients (LQ) adalah angka yang menunjukkan tingkat keunggulan relatif suatu sektor di suatu daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Angka LQ umumnya digunakan untuk menentukan sektor basis di suatu daerah. Angka LQ berkisar dari 0 sampai dengan positif tak terhingga. Angka LQ yang kurang dari 1 mengandung arti bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan relatif. Angka LQ sama dengan satu

mengindikasikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang sama dengan rata-rata semua daerah. Sedangkan angka LQ lebih besar dari 1 memiliki makna bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata.

Angka yang menunjukkan tingkat keunggulan relatif kegiatan lapangan usaha di Propinsi DKI Jakarta dicantumkan pada Tabel 2.23. Angka pada tabel menunjukkan bahwa lapangan usaha di Jakarta yang memiliki keunggulan relatif dibanding propinsi lainnya adalah sektor bangunan dan sektor yang bercirikan jasa-jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Sektor bangunan adalah satu-satunya sektor yang bukan termasuk kategori jasa, tetapi memiliki keunggulan relatif. Hal diakibatkan oleh permintaan pasar akan bangunan memiliki porsi yang relatif besar dibandingkan permintaan yang terjadi di daerah-daerah lainnya. Permintaan pasar akan bangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, perkantoran dan prasarana publik (irigasi, jalan raya, terminal, pelabuhan, perkantoran pemerintah, dll).
- (2) Sektor Listrik, Gas Kota dan Air Bersih merupakan lapangan usaha yang melakukan kegiatan jasa distribusi tenaga listrik, gas dan air bersih. Namun perlu dicatat derajat keunggulan relatifnya memperlihatkan kecenderungan yang menurun selama periode 1993-2000,
- (3) Sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selama periode 1993-2000 menunjukkan pola yang semakin menguat dalam derajat keunggulan-relatifnya.
- (4) Sektor pengangkutan dan komunikasi. Selama periode analisis derajat keunggulan relatifnya boleh dikatakan tidak berubah, walaupun ada sedikit penurunan pada masa pra-krisis.

Sektor lembaga keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan. Propinsi DKI Jakarta secara nasional menjadi pusat dari kegiatan sektor ini, dan sektor ini pun paling menderita dihantam krisis ekonomi. Walaupun demikian, derajat keunggulan relatif sektor ini tidak menurun, bahkan dengan mantap semakin kokoh.

Satu-satunya sektor lapangan usaha yang berciri jasa, tetapi tidak memiliki keunggulan relatif adalah sektor jasa-jasa sosial kemasyarakatan. Hal ini mudah dimengerti karena di dalamnya terdiri dari kegiatan pemerintahan dan jasa-jasa rumah tangga serta jasa-jasa sosial kemasyarakatan. Orientasi dari kegiatan sektor ini tidak ditekankan pada *profit*, melainkan pada pelayanan sosial.

**Tabel 2.23.**  
**Perhitungan LQ Berdasarkan PDRB Harga Konstan Propinsi DKI Jakarta, Periode 1993-2000**

Sektor Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	0.016	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012
Industri Pengolahan	0.915	0.888	0.880	0.853	0.844	0.831	0.831	0.819
Listrik, Gas Dan Air Minum	1.505	1.454	1.332	1.241	1.250	1.282	1.260	1.232
Bangunan	1.929	1.952	1.994	2.031	2.100	1.924	1.907	1.818
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	1.272	1.247	1.254	1.257	1.241	1.469	1.493	1.488
Pengangkutan Dan Komunikasi	1.263	1.207	1.193	1.190	1.195	1.286	1.391	1.379
Kuangan,Persewaan	2.839	2.812	2.765	2.746	2.671	3.135	3.217	3.215
Bangunan & Jasa Perusahaan								
Jasa-Jasa Sosial Kemasyarakatan	1.046	1.031	1.014	0.985	0.951	0.942	0.945	0.955

Kemudian bagi sektor industri pengolahan, sekalipun jumlah perusahaan, volume dan nilai produksi yang terjadi di Propinsi DKI Jakarta tergolong sangat besar, namun sektor ini tidak memiliki keunggulan relatif, bahkan derajat keunggulan-relatifnya semakin berkurang (angka LQ semakin menurun). Yang menjadi pangkal melemahnya keunggulan-relatif sektor ini adalah perkembangan aktifitas produksi di luar Propinsi DKI Jakarta lebih cepat dibanding dengan yang terjadi Jakarta. Hal ini dapat terjadi karena, *pertama* penambahan unit usaha di luar Propinsi DKI Jakarta lebih pesat daripada di Jakarta. Kejadian ini berhubungan dengan preferensi pengusaha memilih lokasi yang sangat erat kaitannya dengan prasyarat aspek lingkungan dan motif-motif ekonomi. *Kedua*, peningkatan kapasitas produksi di luar Propinsi DKI Jakarta lebih tinggi daripada yang terjadi di Jakarta.

Berdasarkan paparan di atas, maka kegiatan ekonomi yang harus dikembangkan dan didorong oleh pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah kegiatan yang tergolong lapangan usaha berciri jasa. Sektor bangunan walaupun bukan termasuk lapangan usaha jasa, namun sektor ini sangat mendukung kegiatan sektor jasa dan perkembangannya akan mengikuti arah permintaan pasar jasa. Oleh karenanya sektor bangunan pun perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan.

Dikuatkan oleh argumentasi di atas maka sudah tepat bahwa salah satu misi pembangunan Propinsi DKI Jakarta adalah untuk mengembangkan Jakarta sebagai Kota Jasa skala nasional dan internasional. Pengembangan sektor jasa akan memberikan dampak positif diantaranya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan aspek kelestarian lingkungan. Pengembangan sektor jasa akan meminimumkan dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap aspek pencemaran.

### **Revealed Comparative Advantage (RCA)**

Pada Tabel 2.24 dicantumkan angka RCA yang lebih besar daripada 1. Angka RCA menggambarkan keunggulan relatif komoditas ekspor yang dikirim dari Propinsi DKI Jakarta dibanding dengan komoditas yang diekspor dari daerah-daerah lainnya. Angka RCA rata-rata selama kurun 1995-2000 disediakan pada kolom terakhir. Angka RCA yang lebih besar dari satu menggambarkan bahwa komoditas tersebut memiliki keunggulan relatif dibanding dengan pengiriman ekspor dari daerah-daerah lain pada umumnya. Semakin besar RCA semakin memiliki keunggulan relatif.

Namun perlu dibaca secara hati-hati, bahwa komoditas-komoditas yang tercantum pada Tabel 2.24 tidak semuanya diproduksi di Jakarta. Boleh jadi komoditas ekspor tersebut diproduksi di luar Propinsi DKI Jakarta, terutama dari Propinsi Jawa Barat dan Banten. Sehingga keunggulan relatif komoditas ekspor yang dikirim melalui pelabuhan di Propinsi DKI Jakarta, tidak secara otomatis menjadi komoditas yang memiliki keunggulan dalam sisi produksi. Keunggulan relatif disini lebih disebabkan oleh kemampuan Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan dalam kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh

tersedianya pelabuhan berkapasitas besar dan dukungan jasa-jasa lainnya yang terkait dengan kegiatan ekspor.

Pesan yang ingin disampaikan melalui angka RCA adalah untuk menunjukkan bahwa Propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi pada bidang jasa atau pelayanan dalam memfasilitasi terlaksananya kegiatan ekspor. Keunggulan tersebut ditunjang oleh peran penyediaan sarana angkutan, prasarana jalan, perbankan, telekomunikasi dan berbagai pelayanan di pelabuhan muat. Fakta-fakta ini memperkuat alasan bahwa memang DKI sudah sepantasnya dijadikan kota Jasa berskala nasional maupun internasional.

**Tabel 2.24.**  
**Angka RCA di atas 1.00, di Propinsi DKI Jakarta**  
**Menurut SITC 3 digit Periode 1995 - 2000**

No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
1	531	BAHAN PEWARNA SINTETIS	3.23	3.19	3.04	2.73	3.13	2.86	3.03
2	783	MOTOR PENGANGKUTAN JALAN RAYA	3.26	3.20	3.06	2.74	3.05	2.84	3.02
3	572	POLIMER DARI STIRENA, BENTUK AWAL	3.18	3.15	2.94	2.70	3.17	2.90	3.01
4	746	BANTALAN PELURU ATAU BANTALAN GILING	3.23	3.20	3.02	2.58	3.08	2.90	3.00
5	571	POLIMER DARI ETILENA, BENTUK AWAL	3.25	3.18	2.95	2.70	3.06	2.69	2.97
6	873	ALAT-ALAT METERAN DAN HITUNG	3.21	3.03	2.79	2.72	3.17	2.77	2.95
7	266	SERAT BUATAN UNTUK DIPINTAL	3.18	3.10	2.91	2.64	3.05	2.76	2.94

No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
8	781	KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENUMPANG.	3.23	3.12	2.89	2.61	2.98	2.77	2.93
9	693	KAWAT DAN PRODUK IKUTANNYA	3.04	3.10	3.04	2.71	3.01	2.71	2.93
10	573	POLIMER DARI VINIL CHLORIDA	3.17	3.09	3.02	2.70	2.89	2.48	2.89
11	895	PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA	3.21	3.10	2.93	2.74	2.69	2.66	2.89
12	574	POLIASETAL,KEC.POLIETEK & DAMAR EPOKSID	3.20	3.11	2.91	2.62	2.86	2.61	2.88
13	792	ALAT PENGANGKUTAN UDARA &PERLENGKAPANNYA	3.25	3.20	3.00	2.52	2.46	2.70	2.85
14	762	ALAT PENERIMA GELOMBANG SUARA	3.17	2.95	2.84	2.42	2.92	2.81	2.85
15	655	BAHAN SULAMAN ATAU RAJUTAN	3.14	3.15	2.90	2.63	2.71	2.56	2.85
16	845	BARANG BARANG LAINNYA	3.09	3.04	2.84	2.63	2.87	2.63	2.85

17	882	DARI TEKSTIL BAHAN UNTUK FOTOGRAFI/FILM.	3.09	3.18	2.70	2.56	2.79	2.70	2.84
18	681	PERAK, PLATINA DAN YG SEMACAMNYA	3.17	3.11	2.97	2.75	3.15	1.74	2.82
19	748	POROS PENGGERAK, ENKOL & LA NDASAN BANTALAN	2.79	3.01	2.72	2.71	2.92	2.73	2.81
20	881	APARAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	3.25	3.18	3.03	2.69	2.95	1.77	2.81
21	713	MESIN PISTON PEMBAKARAN DALAM & BAGIAN.	3.12	3.10	2.86	2.57	2.58	2.62	2.81
22	971	EMAS BUKAN UNTUK MONETER	2.57	2.88	2.97	2.60	3.11	2.68	2.80
23	261	SUTERA DAN SISA-SISA SUTERA	3.26	2.33	3.06	2.38	3.15	2.55	2.79
24	843	PAKAIAN LELAKI & ANAK LELAKI, RAJUTAN	3.14	3.07	2.82	2.46	2.67	2.52	2.78
25	657	BENANG & KAIN TEKSTIL KHUSUS & PRODUKNYA	3.05	2.96	2.86	2.54	2.80	2.45	2.78
26	073	HASIL OLAHAN COKLAT	2.98	2.76	2.90	2.61	2.75	2.59	2.76
27	533	BAHAN PEWARNA LAINNYA	2.97	3.00	2.84	2.27	2.85	2.39	2.72
28	844	PAKAIAN WANITA & ANAK WANITA, RAJUTAN	2.95	2.86	2.67	2.55	2.75	2.54	2.72
29	575	BAHAN PLASTIK LAINNYA, DALAM BENTUK AWAL	2.74	2.96	2.72	2.55	2.65	2.30	2.65
30	841	PAKAIAN LELAKI & ANAK LELAKI BKN RAJUTAN	2.92	2.90	2.66	2.39	2.62	2.40	2.65
31	062	KEMBANG GULA	2.72	2.71	2.69	2.41	2.84	2.43	2.63
32	749	BAGIAN & PERLENGKAPAN MESIN BUKAN LISTRIK	3.01	2.76	2.84	2.44	2.54	2.16	2.62
33	232	GETAH KARET SINTETIS, KARET SINTETIS	2.98	2.06	2.23	2.50	3.13	2.76	2.61
34	742	POMPA UNTUK BARANG CAIR	2.82	3.06	2.69	1.91	2.72	2.28	2.58
No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
35	656	TULE, KAIN BELUDRU DSB.	3.10	3.10	2.90	2.63	2.16	1.48	2.56
36	842	PAKAIAN WANITA & ANAK WANITA BKN RAJUTAN	2.74	2.68	2.48	2.34	2.63	2.46	2.55
37	581	TABUNG, PIPA & SELANG DR BAHAN PLASTIK	3.23	3.12	2.03	1.28	3.00	2.61	2.54
38	553	KOSMETIKA	2.61	2.59	2.45	2.36	2.71	2.55	2.54
39	048	OLAHAN GANDUM DAN TEPUNG LAINNYA	2.78	2.79	2.44	1.90	2.87	2.48	2.54
40	625	BAN LUAR & DALAM, UNTUK SEGALA JENIS RODA	2.62	2.72	2.43	2.30	2.69	2.45	2.53
41	678	KAWAT DARI BESI ATAU BAJA	2.26	2.46	2.20	2.59	2.86	2.68	2.51
42	541	BAHAN OBAT-OBATAN DAN KESEHATAN	2.38	2.69	2.66	2.56	2.83	1.90	2.50
43	542	OBAT-OBATAN (TERMASUK OBAT HEWAN)	2.78	2.74	2.64	2.04	2.51	2.25	2.49
44	714	MESIN DAN MOTOR BUKAN	3.26	3.20	2.00	1.18	2.98	2.30	2.48

45	831	LISTRIK,BAGIAN TDS PERALATAN BEPERGIAN,TAS TANGAN DLL	2.67	2.71	2.40	2.06	2.55	2.39	2.46
46	677	REL- REL&PERLENGKAPANNYA DARI BESI/BAJA	2.66	3.03	2.90	1.63	2.19	2.32	2.46
47	613	KULIT BERBULU	3.26	3.20	3.03	0.46	2.67	2.10	2.45
48	666	BARANG PORSELIN DAN PECAH BELAH LAINNYA	2.55	2.50	2.25	2.45	2.65	2.27	2.44
49	851	SEPATU DAN PERALATAN KAKI LAINNYA	2.57	2.57	2.50	2.18	2.55	2.20	2.43
50	683	BARANG-BARANG NIKEL	3.02	0.24	3.05	2.76	2.61	2.90	2.43
51	723	MESIN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI,TDS.	2.33	2.10	2.52	2.51	2.66	2.39	2.42
52	633	BARANG-BARANG GABUS	3.24	3.19	2.43	2.76	1.58	1.24	2.41
53	267	SERAT BUATAN LAINNYA UNTUK DIPINTAL	2.30	2.19	2.20	2.05	2.76	2.73	2.37
54	724	MESIN UTK MENGERJAKAN TEKSTIL DAN KULIT	2.39	2.71	2.57	1.94	2.37	2.25	2.37
55	786	KERETA GANDENGAN & KEND.LAIN,TDK.BERMOT.	3.17	3.19	2.81	2.22	1.73	1.08	2.37
56	846	PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KAIN TEKSTIL	2.59	2.53	2.35	2.39	2.26	2.08	2.37
57	112	MINUMAN MENGANDUNG ALKOHOL	1.48	2.35	2.50	2.20	3.02	2.55	2.35
58	653	KAIN TENUNAN DARI SERAT BUATAN	2.96	2.90	2.80	2.33	1.72	1.36	2.35
59	629	BARANG-BARANG KARET, TDS	2.46	2.09	2.22	2.29	2.46	2.55	2.35
60	731	MESIN PERKAKAS,BKJA PINDAHKAN BRG LAIN	2.35	1.94	2.13	2.55	2.82	2.27	2.34
61	761	ALAT PENERIMA GAMBAR (TERMASUK VIDEO)	2.17	1.72	2.08	2.37	2.88	2.84	2.34
62	579	SISA BAHAN PLASTIK	2.53	2.74	1.41	2.33	2.70	2.33	2.34

No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
63	017	DAGING,KALENGAN ATAU OLAHAN	3.26	3.20	2.91	2.31	0.98	1.27	2.32
64	782	KENDARAAN BERMOTOR UNTUK BARANG	3.26	2.51	2.23	2.48	1.60	1.80	2.31
65	651	BENANG TEKSTIL	2.50	2.55	2.48	2.23	2.20	1.86	2.30
66	654	KAIN TENUNAN-LAINNYA	2.90	3.00	2.69	2.41	1.57	1.23	2.30
67	554	SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH LAINNYA	2.17	2.40	2.32	2.16	2.58	1.99	2.27
68	735	BAGIAN DAN PERLENGKAPAN MESIN PERKAKAS	2.97	2.14	0.79	2.62	2.19	2.79	2.25
69	074	T E H	2.25	2.27	2.28	2.14	2.32	2.07	2.22
70	733	MESIN PERKAKAS UNTUK LOGAM	1.85	1.60	2.62	2.47	2.45	2.31	2.22
71	662	BARANG KONSTRUKSI	2.19	1.92	2.17	2.11	2.61	2.23	2.21
72	727	MESIN UNT.INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN	2.18	2.65	2.65	2.48	1.20	1.64	2.13

73	582	PELAT, LEMBARAN, FILM & FOIL DR PLASTIK	2.16	2.14	2.16	1.92	2.40	1.97	2.12
74	898	ALAT MUSIK DAN PERLENGKAPANNYA	2.44	1.97	2.55	2.01	1.70	1.97	2.11
75	667	MUTIARA DAN BATU PERMATA	2.26	2.39	1.94	1.86	2.14	1.85	2.07
76	784	BAGIAN &PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR	1.70	1.61	2.42	1.88	2.45	2.38	2.07
77	899	BARANG-BARANG BUATAN PABRIK LAINNYA	2.12	2.11	1.97	1.84	2.29	1.96	2.05
78	211	JANGAT DAN KULIT BELUM DISAMAK	3.04	2.08	2.41	1.31	2.22	1.22	2.05
79	664	KACA / GELAS	2.37	2.18	2.30	1.65	1.80	1.94	2.04
80	023	MENTEGA,LEMAK & MINYAK LAINNYA DR SUSU	3.26	2.26	2.98	0.38	0.76	2.59	2.04
81	591	OBAT PEMBASMI KUMAN,SERANGGA,CENDAWAN DS	3.01	2.11	2.05	1.62	1.82	1.60	2.03
82	743	POMPA UNTUK LAINNYA DAN KOMPRESOR	2.27	2.59	1.89	0.97	2.02	2.32	2.01
83	282	SISA-SISA BESI BAJA	2.27	2.27	2.38	2.06	1.50	1.58	2.01
84	699	PRODUK LOGAM TIDAK MULIA,LAINNYA	2.36	2.40	2.00	1.92	1.39	1.93	2.00
85	263	SERAT KAPAS	2.40	1.68	2.04	1.99	2.26	1.58	1.99
86	674	BESI LEMBARAN, DISEPUH	0.74	1.12	2.87	1.98	2.00	2.86	1.93
87	513	ASAM POLIKARBOKSIL DAN ANHIDRANYA	2.79	2.26	1.52	1.98	1.69	1.32	1.93
88	721	MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	1.50	1.59	1.88	2.28	2.68	1.61	1.92
89	022	SUSU,KEP.SUSU&HASILNYA A KEC.MENTEGA&KEJU	3.09	3.00	1.77	0.64	0.69	2.18	1.89
90	791	KERETA API DAN TREM	1.63	2.87	2.40	0.34	2.38	1.60	1.87
91	763	PESAWAT PEREKAM SUARA/GAMBAR	2.08	1.80	1.54	1.38	1.78	2.62	1.86
92	752	MESIN OTOMATIS PENGOLAH DATA &SATUANNYA	2.46	2.60	2.44	0.82	0.97	1.87	1.86
No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
93	269	PAKAIAN DAN BARANG TEKSTIL BEKAS	1.48	1.94	1.31	2.09	2.17	1.95	1.82
94	583	BAHAN PLASTIK DALAM BENTUK MONOFIL	2.20	1.11	1.96	0.08	2.74	2.85	1.82
95	894	KERETA BAYI,MAINAN ANAK-ANAK DLL .	1.84	1.69	2.09	1.90	1.45	1.76	1.79
96	692	TANGKI UNTUK PENYIMPANAN/PENGAKUTAN BRG	1.96	1.88	2.23	1.72	1.62	1.31	1.78
97	025	T E L U R	3.07	0.28	0.79	2.73	2.31	1.28	1.74
98	773	ALAT PENGATUR,PEMBAGI ARUS LISTRIK	2.12	2.07	1.54	1.21	1.76	1.72	1.74
99	695	PERKAKAS PERTUKANGAN TANGAN	1.78	0.90	1.86	1.86	2.22	1.77	1.73
100	848	BARANG & PERLENGK.PAKAIAN,BUKANA TEKSTIL	2.47	1.99	1.57	1.06	1.50	1.78	1.73
101	665	BARANG-BARANG KACA	1.60	1.84	1.44	1.73	2.10	1.66	1.73

102	652	KAIN TENUNAN,KAPAS	2.23	2.09	1.70	1.34	1.45	1.31	1.69
103	268	WOOL DAN BULU HEWAN LAINNYA	1.17	2.95	2.36	0.00	2.41	1.20	1.68
104	726	MESIN CETAK DAN MESIN JILID BUKU	0.29	0.96	1.36	2.40	2.31	2.69	1.67
105	658	BARANG TEKSTIL JADI LAINNYA	1.94	1.70	1.56	1.56	1.71	1.49	1.66
106	024	KEJU DAN DADIH SUSU	0.00	2.76	0.64	2.41	1.87	2.22	1.65
107	712	TURBIN UAP & TURBIN PEMBANGKIT LAINNYA	1.78	1.91	1.67	1.13	1.28	2.12	1.65
108	612	BARANG-BARANG KULIT	0.98	1.67	2.29	0.69	1.95	2.10	1.61
109	659	PERMADANI DAN SEMACAMNYA	1.78	1.34	1.85	1.67	1.63	1.28	1.59
110	411	MINYAK DAN LEMAK HEWANI	1.82	1.70	2.25	0.17	2.20	1.40	1.59
111	778	ALAT LISTRIK LAINNYA	1.95	1.98	1.32	1.27	1.42	1.49	1.57
112	883	FILM SINEMATOGRAFI,SUDAH DICUCI/DISINARI	0.00	3.20	3.06	0.00	0.21	2.91	1.56
113	785	SEPEDA MOTOR,SPD.KUMBANG DAN SEPEDA LAIN	1.41	1.43	1.19	1.55	1.93	1.72	1.54
114	265	SERAT TUMBUH- TUMBUHAN LAINNYA	1.77	1.30	1.79	0.51	1.12	2.74	1.54
115	741	APARAT PEMANAS DAN PENDINGIN & ALAT2NYA	0.94	1.21	0.98	2.02	2.13	1.88	1.53
116	694	PAKU, MUR, BAUT DAN SEMACAMNYA	2.15	1.08	1.82	1.91	0.96	1.01	1.49
117	691	BANGUNAN DAN BAGIAN BANGUNAN	1.47	1.46	1.01	1.25	1.89	1.77	1.47
118	728	MESIN LAINNYA UNTUK INDUSTRI TERTENTU	0.35	1.06	2.06	2.11	1.80	1.41	1.46
119	641	KERTAS DAN KERTAS KARTON	1.18	1.33	1.54	1.64	1.61	1.40	1.45
120	598	BAHAN KIMIA LAINNYA,TDS	1.29	1.37	1.23	1.70	1.28	1.77	1.44
121	621	BAHAN-BAHAN DARI KARET	0.88	1.60	1.00	1.21	2.54	1.37	1.43

No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
122	771	MESIN PEMBANGK.TENAGA,DIGER AKKAN LISTRIK	1.61	1.18	1.13	1.25	1.25	2.12	1.42
123	893	BARANG-BARANG PLASTIK BUATAN	1.61	1.66	1.25	1.17	1.41	1.33	1.41
124	672	INGOT BESI BAJA	0.68	0.71	0.37	1.91	3.06	1.57	1.38
125	111	MINUMAN TAK MENGANDUNG ALKOHOL	1.27	1.83	1.35	0.68	1.74	1.31	1.36
126	597	HASIL TAMBAHAN DR OLAHAN MINYAK MINERAL	2.97	2.77	0.24	0.40	0.71	1.01	1.35
127	871	ALAT OPTIS DAN PERLENGKAPANNYA	0.30	2.12	0.11	0.65	2.49	2.13	1.30
128	921	BARANG BARANG KIRIMAN	0.00	0.00	2.05	1.71	1.54	2.46	1.29
129	896	BARANG-BARANG SENI & ANTI	0.93	1.21	2.02	0.84	1.52	1.17	1.28
130	098	HASIL OLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN,TDS.	1.42	1.45	1.43	0.80	1.16	1.29	1.26
131	696	PISAU DAN ALAT	1.12	1.20	1.04	0.86	1.26	1.62	1.18

132	278	POTONGAN LAINNYA	1.23	1.22	1.02	0.75	1.34	1.44	1.17
133	874	BAHAN MINERAL LAINNYA	1.08	0.83	1.00	1.22	1.00	1.78	1.15
		ALAT							
		PENGUKUR,PEMERIKSA &							
		MENGAWASI							
134	744	MESIN BONGKAR MUAT	0.95	0.53	1.58	1.06	1.57	1.12	1.14
		BARANG							
135	725	MESIN UNTUK	0.49	0.48	0.43	2.03	1.50	1.88	1.14
		MENGERJAKAN PULP &							
		KERTAS							
136	611	KULIT DISAMAK	1.61	1.49	1.02	0.65	1.01	1.02	1.13
137	775	ALAT KEPERLUAN RUMAH	1.04	1.17	0.74	0.86	1.43	1.45	1.12
		TANGGA,LISTRIK/TIDA							
138	516	KIMIA ORGANIK LAINNYA	0.77	2.27	0.82	0.54	1.12	1.14	1.11
139	772	ALAT	1.82	1.59	0.85	0.76	0.55	1.04	1.10
		PENYAMBUNG/PEMUTUS							
		ARUS LISTRIK							
140	288	SISA LOGAM TIDAK	0.56	0.88	1.22	1.12	1.62	1.20	1.10
		MENGANDUNG BESI							
141	523	GARAM	0.44	1.25	1.48	0.67	1.02	1.62	1.08
		LOGAM&PEROKSIDA DR							
		ASAM ANORGANIK							
142	745	PERKAKAS TANGAN &	0.54	0.60	0.67	1.83	1.55	1.21	1.07
		MESIN BUKAN LISTRIK							
143	776	TABUNG	1.32	1.53	1.12	0.49	0.16	1.71	1.05
		THERMIONIS,KATODA							
		DINGIN,KAT.FOTO							
144	661	SEMEN,KAPUR & BHN	1.33	0.90	0.67	1.18	1.12	1.07	1.05
		BANGUNAN BUATAN							
		PABRIK							
145	911	BARANG BARANG KIRIMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	2.91	1.02

### Analisis Shift-Share

Analisis shift-share adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengamati struktur pasar perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif dengan cara menekankan pada bagian-bagian pertumbuhan sektor atau industri di daerah, dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di daerah tersebut dengan data yang terbatas.

Dalam analisis ini, pertumbuhan kegiatan di suatu daerah pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu:

1. *National Share/National Growth Effect (N)*, yaitu pertumbuhan daerah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Jika daerah tumbuh seperti rata-rata nasional, maka peranannya terhadap nasional akan tetap.
2. *Proportional Shift/Sectoral Mix Effect/Composition Shift (M)*, yaitu perbedaan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional sektoral dan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional total. Daerah dapat tumbuh lebih cepat/lambat daripada rata-rata nasional jika mempunyai sektor/industri yang tumbuh lebih cepat/lambat dari nasional. Dengan demikian perbedaan laju pertumbuhan dengan nasional disebabkan oleh komposisi sektoral yang berbeda.
3. *Differential Shift/Regional Share/Competitive Effect(S)*, yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah secara aktual dengan pertumbuhan daerah jika menggunakan pertumbuhan sektoral nasional. Daerah dapat saja mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain, karena lingkungannya mendorong suatu sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan disini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu.

Berdasarkan keadaan di atas, maka dibuatkan perumusan shift share secara kuantitatif. Pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh share nasional, proporsional shift dan differensial shift atau

$$R = N + M + S$$

dimana

- R = perubahan total di daerah  
 N = Share nasional  
 M = Proportional Shift/Sectoral Mix  
 S = Differential Shift/share daerah

Adapun perumusan N, M, dan S masing-masing adalah

$$N = \left( \frac{X_{nt}}{X_{no}} - 1 \right) X_{iro}$$

$$M = \left( \frac{X_{int}}{X_{ino}} - \frac{X_{nt}}{X_{no}} \right) X_{iro}$$

$$S = \left( \frac{X_{irt}}{X_{iro}} - \frac{X_{int}}{X_{ino}} \right) X_{iro}$$

dimana

X = data statistik yang digunakan yang dapat berupa: tenaga kerja, input, output, PDRB dan lain-lain

n = menunjukkan nasional

r = menunjukkan regional

i = menunjukkan industri

t = menunjukkan tahun akhir

o = menunjukkan tahun awal

Jika M dan S positif, menunjukkan bahwa komposisi kegiatan di daerah sudah baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, jika M negatif atau S negatif menunjukkan bahwa komposisi kegiatan belum cukup baik, namun masih mungkin ditingkatkan dengan membandingkannya dengan komposisi nasional.

Dalam menentukan komoditas unggulan, maka komponen S dan M ini akan digunakan sebagai kriteria kinerja komoditas pada tahap pertama. Komponen M yang positif menunjukkan keunggulan komoditas tertentu dibandingkan dengan komoditas serupa di daerah lain, sedangkan komponen S yang positif menunjukkan komposisi industri yang sudah relatif baik dibandingkan dengan nasional.

Analisis shift-share dalam bahasan ini diterapkan untuk menganalisis pergeseran peran pendapatan regional sektoral di Propinsi DKI Jakarta. Tabel 2.25 memuat angka-angka proses dan hasil perhitungan analisis Shift-share.

**Tabel 2.25.**  
**Analisis Shift–Share PDRB Menurut Sektor**  
**Propinsi DKI Jakarta, Periode 1990-2000**

Sektor Lapangan Usaha	Propinsi DKI Jakarta (Milyar Rp)		Nasional (Milyar Rp)		Pertumbuhan			N	M	S	R
	1990	2000	1990	2000	Nasional	Nasional	Daerah				
					Total	Sektoral	Sektoral				
Pertanian	191	116	53654	66088	1.474	1.232	0.607	90	-46	-119	-75
Pertambangan dan Penggalian	0	0	28508	38730	1.474	1.359	0.000	0	0	0	0
Industri Pengolahan	8526	12875	55725	105103	1.474	1.886	1.510	4042	3513	-3206	4349
Listrik, Gas dan Air Minum	702	1226	2336	6650	1.474	2.847	1.746	333	964	-773	524
Bangunan	4206	6470	16289	23247	1.474	1.427	1.538	1994	-197	468	2264
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9223	14166	44936	63449	1.474	1.412	1.536	4372	-572	1143	4943
Pengangkutan dan Komunikasi	3271	6042	17832	29284	1.474	1.642	1.847	1551	550	670	2771
Keuangan,sewa bangunan & jasa perusahaan	9198	13168	21122	27383	1.474	1.296	1.432	4360	-	1243	3970
Jasa-jasa	4791	5429	29561	38002	1.474	1.286	1.133	2271	-903	-729	639
<b>Total</b>	<b>40108</b>	<b>59492</b>	<b>269962</b>	<b>397934</b>	<b>1.474</b>	<b>1.474</b>	<b>1.483</b>	<b>19013</b>	<b>1675</b>	<b>-1303</b>	<b>19384</b>

Angka-angka pada kolom R di Tabel 2.25 menunjukkan bahwa selama periode 1990-2000, semua sektor di Propinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan pendapatan (PDRB), kecuali sektor pertanian. Dalam kurun waktu itu, total pendapatan meningkat sebesar Rp 19 384 milyar, yang dihitung menurut harga konstan 1993.

Kemudian bila diperhatikan kolom M yaitu kolom yang menunjukkan pola pergeseran peran pendapatan sektoral pada tingkat nasional. Angka negatif menandakan pertumbuhan pendapatan suatu sektor lebih kecil daripada pertumbuhan pendapatan total nasional. Artinya andil-relatif suatu sektor dalam pembentukan pendapatan total semakin menurun atau berkurang. Sedangkan angka positif menggambarkan pertumbuhan pendapatan suatu sektor lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan total nasional. Yang berarti andil-relatif sektor dalam pembentukan pendapatan total semakin meningkat.

Sektor industri pengolahan; listrik, Gas dan Air Bersih; dan angkutan dan komunikasi memberikan andil-relatif pendapatan yang semakin besar secara nasional pada periode 1990-2000. Sedangkan andil pendapatan pertanian; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, sewa bangunan dan

jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa secara nasional mengalami kemunduran selama periode 1990-2000.

Selanjutnya yang menarik diperhatikan adalah angka-angka pada kolom S, yaitu kolom yang berisi pergeseran andil-relatif atau share daerah. Angka negatif menandakan bahwa sektor mengalami peran atau andil-relatif yang berkurang atau mundur dalam pembentukan pendapatan total. Sebaliknya angka positif menunjukkan bahwa sektor di Propinsi DKI Jakarta mengalami peran-relatif yang meningkat dalam pembentukan pendapatan total. Pendapatan sektor pertanian; industri pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; dan jasa-jasa mengalami perkembangan andil-relatif yang menurun selama periode 1990-2000. Sebaliknya sektor bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan mengalami andil-relatif yang meningkat selama periode itu.

Jika pada tingkat nasional sektor bangunan memberikan andil-relatif pendapatan yang menurun, maka di Propinsi DKI Jakarta andil-relatifnya semakin meningkat. Hal ini berlaku pula untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

Kemudian jika pada tingkat nasional industri manufaktur; dan listrik, Gas dan Air Bersih mengalami andil-relatif pendapatan yang semakin besar, maka di Propinsi DKI Jakarta andil-relatifnya semakin menurun. Peran pendapatan sektor angkutan dan komunikasi baik di tingkat nasional maupun Propinsi DKI Jakarta sama-sama meningkat. Sebaliknya sektor pertanian dan jasa-jasa sosial kemasyarakatan andil-relatif pendapatannya sama-sama menurun baik di tingkat nasional maupun di Propinsi DKI Jakarta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah bahwa sektor bangunan dan sektor-sektor ekonomi berbasis jasa (yaitu perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan transportasi; keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan) di Propinsi DKI Jakarta selama periode 1990-2000 andil-relatifnya semakin bertambah. Proses perubahan andil-relatif sektor-sektor tersebut kemungkinan besar akan berlanjut pada masa yang akan datang. Oleh

karenanya sektor-sektor tersebut akan semakin dominan dalam memberikan pendapatan bagi masyarakatnya dalam jangka panjang ke depan.

## **PROSPEK PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA 2002-2007**

### **Laju Pertumbuhan PDRB**

Untuk memproyeksikan perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta periode 2003-2007 dilakukan pendekatan model ekonometrika. Model ekonometrika yang digunakan adalah Vector Autoregressive (VAR). Model ini didasarkan pada asumsi bahwa kondisi makro ekonomi nasional akan berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa sektoral produksi Propinsi DKI Jakarta, serta terdapat peristiwa saling pengaruh-mempengaruhi antar kegiatan ekonomi sektoral. Oleh karenanya yang bertindak sebagai variabel endogen model adalah (1) nilai tambah sektor pertanian, (2) nilai tambah sektor industri pengolahan, (3) nilai tambah sektor listrik, gas dan air bersih, (4) nilai tambah sektor bangunan, (5) nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran, (6) nilai tambah sektor angkutan dan komunikasi, (7) nilai tambah sektor keuangan dan jasa perusahaan, (8) nilai tambah sektor jasa-jasa lainnya, dan (9) nilai tambah total (PDRB total). Kemudian yang bertindak sebagai variabel eksogennya adalah (1) nilai konsumsi rumah tangga nasional, (2) nilai investasi nasional, (3) nilai ekspor nasional, (4) impor nasional, (5) PDB nasional, (6) nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, (7) variabel dummy krisis dan (8) jumlah penduduk. Semua variabel yang dinilai dengan uang dinyatakan dalam harga konstan 1993, kecuali variabel nilai tukar.

Beberapa alternatif model VAR diestimasi menggunakan data tahun 1973-2001. Model VAR yang terbaik kemudian disimulasi secara dinamis hingga tahun 2008. Salah satu hasil simulasi adalah proyeksi angka laju pertumbuhan ekonomi sektoral Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2002-2007, yang angkanya dapat dibaca pada Tabel 2.26.

**Tabel 2.26.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi DKI Jakarta Menurut Harga Konstan 1993,**  
**Periode 1998-2007, dalam Persen**

No.	Sektor Lapangan Usaha	Historis				Proyeksi						
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2003-07
1	Pertanian	-15.00	11.33	-0.96	-0.19	1.90	-3.49	-2.97	-1.63	-1.16	-0.94	<b>-2.04</b>
2	Industri Manufaktur	-17.97	2.63	3.91	3.46	3.90	4.14	5.14	5.87	6.15	6.30	<b>5.52</b>
3	Listrik, Gas dan Air Minum	-8.81	5.25	5.57	4.55	5.60	5.03	3.59	3.88	3.57	3.93	<b>4.00</b>
4	Bangunan	-38.29	-2.80	1.02	1.59	2.10	5.57	7.65	8.96	10.41	11.83	<b>8.88</b>
5	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-15.42	0.62	4.54	4.56	4.40	2.92	3.68	4.55	5.53	6.51	<b>4.64</b>
6	Angkutan dan Komunikasi	-11.99	6.16	7.63	5.61	7.50	3.13	3.08	3.15	4.07	5.15	<b>3.72</b>
7	Keuangan dan Jasa Perusahaan	-9.62	-6.17	3.83	3.28	3.40	8.29	7.89	5.64	4.37	3.85	<b>6.01</b>
8	Jasa-jasa lainnya	-11.63	1.05	2.53	2.73	2.80	1.79	1.99	2.39	2.80	3.22	<b>2.44</b>
	<b>Total PDRB</b>	<b>-17.49</b>	<b>-0.29</b>	<b>3.98</b>	<b>3.64</b>	<b>4.08</b>	<b>4.62</b>	<b>5.16</b>	<b>5.20</b>	<b>5.48</b>	<b>5.96</b>	<b>5.28</b>

Laju pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta tahun 2002 diperkirakan mencapai angka 4.08%, yang lebih tinggi dari angka nasional yang diperkirakan sekitar 3.5%. Selanjutnya perekonomian Jakarta akan tumbuh 4.62% untuk tahun 2003. Pada tahun 2004 dan 2005, diperkirakan tumbuh masing-masing 5.16% dan 5.20%. Kemudian ekonomi akan tumbuh lebih tinggi lagi pada tahun 2006 dan 2007 yaitu masing-masing 5.48% dan 5.96%. Angka-angka laju pertumbuhan ini memberikan sinyal bahwa proses pemulihan ekonomi akan lebih cepat dari yang diperkirakan semula, dimana laju pertumbuhan ekonomi sebelumnya diperkirakan berada pada kisaran 4-5% per tahun. Pertumbuhan yang relatif cepat tersebut menggambarkan semakin kondusifnya iklim ekonomi, yang telah ditandai dengan kecenderungan inflasi yang menurun, sukubunga bank yang semakin menurun, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta faktor-faktor keamanan dan suhu politik yang semakin bersahabat selama triwulan I dan II tahun 2002.

Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun selama periode 2003-2007 adalah 5.28 %. Angka laju pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 5.96 %, yang mencerminkan kenaikan tertinggi dari kondisi 2003 sebesar 4.62 %. Dilihat secara sektoral, maka nilai tambah sektor pertanian terus menyusut. Sedangkan sektor-sektor lainnya berkembang positif, dengan

laju pertumbuhan tertinggi selama periode 2003-2007 diraih oleh sektor bangunan dengan rata-rata 8.88 % per tahun.

Sektor-sektor yang mendominasi perekonomian Jakarta, yakni industri manufaktur; perdagangan, hotel dan restoran; dan Lembaga keuangan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu masing-masing 5.52, 4.64, dan 6.01 persen per tahun selama periode 2003-2007. Tingginya pertumbuhan ketiga sektor tersebut memberikan harapan yang menggembirakan bagi perekonomian selama 5 tahun ke depan.

### **Laju PDRB per Kapita**

Dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi hasil proyeksi model ekonometrika yang angka-angkanya dicantumkan pada Tabel 2.26 dan pertumbuhan penduduk ke depan mengikuti laju yang terjadi pada satu dekade terakhir, maka diperoleh angka-angka pendapatan per kapita seperti yang dicatat pada Tabel 2.27.

PDRB per kapita pada tahun 2000 mencapai Rp 22.54 triliun. Pada tahun 2001 PDRB per kapita meningkat mencapai angka Rp 26.17 triliun. Kenaikan ini didukung oleh kondisi perekonomian yang semakin baik. Selanjutnya, PDRB per kapita pada periode tahun 2003–2007 diperkirakan akan semakin naik, yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya serta pertumbuhan penduduk yang sangat rendah. Sebagai tambahan penduduk Propinsi DKI Jakarta akan berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak jauh berbeda dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 1990-2000 yaitu sekitar 0.15 persen per tahun.

**Tabel 2.27.**  
**PDRB per Kapita Propinsi Propinsi DKI Jakarta**

Tahun	Penduduk (juta jiwa)	PDRB –Harga Berlaku (triliun Rp)	PDRB per Kapita Harga Berlaku (juta rupiah)	PDRB –Harga Konstan 1993 (triliun Rp)	PDRB per Kapita Harga Konstan 1993 (juta rupiah)
2000	8.39	189.08	22.54	59.69	7.11
2001	8.40	219.86	26.17	61.87	7.37
2002	8.42	247.26	29.37	64.39	7.65
2003	8.43	291.72	34.61	67.36	7.99
2004	8.44	349.30	41.39	70.84	8.39
2005	8.46	418.12	49.42	74.52	8.81
2006	8.47	502.41	59.32	78.61	9.28
2007	8.48	612.48	72.23	83.29	9.82